

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) 2021**



**KANTOR KECAMATAN PURI
KAB. MOJOKERTO**

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Puri Tahun Anggaran 2021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Puri Tahun 2021 ini merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Puri, Januari 2022



NALURITA P., SSTP., M.Med.Kom.

Pembina

NIP. 19810402 199912 2 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	4
D. Sistematika Penyajian	6
BAB II Perencanaan Kinerja	8
A. Rencana Kinerja Tahunan.....	8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	8
BAB III A. Capaian Kinerja	11
B. Analisis Capaian Kinerja	11
C. Realisasi Anggaran	28
BAB IV Penutup	21
A. Kesimpulan	21
Lampiran-lampiran	
1. Matriks Renstra Kecamatan Puri 2021 - 2026	
2. Matriks Renja Kecamatan Puri Tahun 2021	
3. Realisasi Anggaran Kecamatan Puri Tahun 2021	
4. Bezetting Kecamatan Puri 2021	
5. Struktur Organisasi OPD Kecamatan Puri 2021	
6. Rencana Aksi Tahun 2021	
7. IKU / IKI Kecamatan Puri	
8. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	
9. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021	
10. Laporan Kinerja JFU	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah.

Sesuai dengan ketetapan MPR Nomor : XI/MPR/1998 dan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme, yang selanjutnya telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai Unsur Penyelenggara Negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Puri Tahun 2021 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Hal ini semata-mata kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa Kantor Kecamatan Puri mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes, disisi yang lain, penyusunan LKjIP Kantor Kecamatan Puri juga dimaksudkan sebagai pengejawantahan

prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan good governance dan menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Puri berada pada bagian selatan ibukota Kabupaten Mojokerto dengan luas wilayah 35.697 km² yang terdiri dari 2.276,181 km² lahan pertanian dan non pertanian 33.420,819 km² lahan perumahan dan pekarangan. Wilayah Kecamatan Puri terletak pada ketinggian antara 48 m diatas permukaan air laut. Adapun batas – batas wilayah kecamatan Puri sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kota Mojokerto
- Sebelah Timur : Kecamatan Dlanggu
- Sebelah Selatan : Kecamatan Jatirejo
- Sebelah Barat : Kecamatan Sooko, Kec. Trowulan

PETA WILAYAH KECAMATAN PURI



Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kantor Kecamatan Puri mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan berdasarkan Perbup Mojokerto No 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Seta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto ini terdiri atas :

1. Camat.
2. Sekretariat
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan
6. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

7. Seksi Pembangunan
8. Seksi Kemasyarakatan
9. Seksi Pelayanan
10. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Kecamatan Puri berdasarkan Perbup Mojokerto No 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto, adalah terdiri atas:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan;
 - a) Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Penyusunan program dan keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Kemasyarakatan;
- f. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- g. Seksi Pelayanan.

Berkaitan dengan permasalahan utama (strategic issue) serta Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan Puri diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan kondisi eksternal kecamatan.

a. Kondisi Internal

Kondisi Internal Kecamatan dipengaruhi 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Puri.

- Faktor Kekuatan Organisasi

1. Adanya dukungan dana meskipun dalam jumlah yang sedikit untuk biaya operasional dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam rencana kerja dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Puri.
2. Adanya dukungan teknologi informasi yang dapat mempercepat pelaksanaan tugas.

- Faktor Kelemahan Organisasi

1. Volume pekerjaan yang ada tidak ditunjang oleh ketersediaan jumlah aparatur kecamatan yang kurang mencukupi. Berdasarkan analisa beban kerja tahun 2020, Kecamatan Puri masih membutuhkan kurang lebih sebanyak 10 orang pegawai dan pada akhir tahun 2021 baru dapat tenaga sebanyak 5 orang pegawai.
2. Sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas masih kurang memadai. Akhir tahun 2020 baru saja menempati gedung baru Kantor Kecamatan Puri dan juga dengan masih adanya pandemi di tahun 2021 , sehingga untuk sementara proses kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik masih kurang optimal dan dilaksanakan dengan kondisi seadanya.
3. Masih adanya aparatur yang kurang memahami penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang ada baik ditingkat kecamatan maupun desa sehingga perlu banyak dilakukan pendampingan, pelatihan dan pembinaan.

b. Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal Kecamatan Puri juga dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor strategis yaitu Faktor Peluang Organisasi dan Faktor Tantangan Organisasi, karena berada diluar lingkungan kecamatan, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Puri dan

mebutuhkan koordinasi serta kerjasama dengan Instansi terkait, namun demikian keberadaan faktor eksternal dapat berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja organisasi.

- Faktor Peluang Organisasi

1. Kondisi Wilayah Kecamatan Puri termasuk daerah yang subur, sehingga merupakan daerah yang prospektif dan produktif untuk pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan kegiatan lainnya.
2. Adanya perbaikan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto seperti perbaikan jalan poros, jalan lingkungan dan jembatan sangat berpengaruh terhadap kegiatan transportasi dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat khususnya Wilayah Kecamatan Puri ;
3. Keadaan masyarakat yang relatif kondusif sehingga mendukung pelaksanaan pembangunan dalam segala bentuk baik pembangunan fisik maupun mental spiritual.

- Faktor Hambatan / Tantangan Organisasi

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga Perilaku hidup sehat terutama kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah/limbah
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.
3. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana bermain / olah raga untuk masyarakat masih kurang.
4. Masih adanya aparatur yang kurang memahami penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dengan baik sehingga perlu banyak dilakukan pendampingan ,pelatihan dan pembinaan khususnya SDM yang ada pada perangkat daerah Kecamatan dan Perangkat Desa.

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Puri selama

tahun 2021. Capaian kinerja (performance results) 2021 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 62 Tahun 2018 sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Puri Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;

B. Realisasi Anggaran, menguraikan realisasi anggaran yang digunakan, dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup, menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana strategis Kantor Kecamatan Puri Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto yang terdiri dari sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai Kantor Kecamatan Puri pada tahun 2021 sebagai berikut :

RKT HASIL PERBAIKAN/REVIU TAHUN 2021 KECAMATAN PURI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Prosentase Pelayanan yang terlayani sesuai standart pelayanan	80 %
		Prosentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan dalam satu tahun bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial.	81 %

G. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dijelaskan bahwa Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program /

kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Secara umum format perjanjian kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
KECAMATAN PURI KABUPATEN MOJOKERTO**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya pelayanan kesekretariatan Kecamatan	1.1	IKM Kecamatan	80
		1.2	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantora	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	2.1	Persentase PATEN yang terlayani sesuai standart pelayanan	80 %
		2.2	Persentase kepuasan masyarakat terhadap hasil koordinasi yang ditindak lanjuti bidang : Pemerintahan,Pembangunan,Ke tentraman dan ketertiban serta Kesejahteraan Masyarakat	80 %
		2.3	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai standart pelayanan	80 %
		2.4	Prosentase hasil rekomendasi,koordinasi yang ditindaklanjuti bidan : Pemerintahan,Pembangunan,Ke tentraman ketertiban umum dan Kesejahteraan Masyarakat	80 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.826.516.922,00	PAPBD 2021
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 44.240.000,00	PAPBD 2021
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 93.720.000,00	PAPBD 2021
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp 82.167.500,00	PAPBD 2021
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 55.120.000,00	PAPBD 2021

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Puri Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kecamatan Puri Tahun 2021 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Puri Tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya pelayanan kesekretariatan Kecamatan	IKM Kecamatan	80	89,02	111%
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantora	100 %	100 %	100 %
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase PATEN yang terlayani sesuai standart pelayanan	80 %	100 %	122 %
		Persentase kepuasan masyarakat terhadap hasil koordinasi yang ditindak lanjuti bidang : Pemerintahan,Pe	80 %	100 %	125 %

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
		mbangunan,Ketertarikan dan ketertiban serta Kesejahteraan Masyarakat			
		Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai standart pelayanan	80 %	100 %	125 %
		Prosentase hasil rekomendasi,koordinasi yang ditindaklanjuti bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketertarikan ketertiban umum dan Kesejahteraan Masyarakat .	80 %	100 %	125 %

b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1

Sasaran pertama Meningkatnya pelayanan kesekretariatan Kecamatan , dengan indikator nilai IKM Kecamatan , target 80, realisasi 89,02 dengan capaian 111% , Adapun program yang dilaksanakan adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dengan kegiatan :

- Perencanaan , Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD

Sasaran Strategis 2

Sasaran kedua Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti. Target dari kegiatan ini sebesar 80%. Realisasi yang dicapai per tanggal 31 Desember 2021 adalah 100%, sehingga dapat dikatakan bahwa target dapat tercapai 125%.

Adapun program yang dilaksanakan adalah :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program Pembinaan dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa

Berdasarkan pengukuran kinerja di atas, dapat diperoleh data dan informasi kinerja PD Kecamatan Puri pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
			Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan	Nilai IKM	82	70 %	71.81 %	89,02
	Persentase rekomendasi fasilitasi serta hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang : Pemerintahan, Pembangunan	- %	- %	- %	100 %

	perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan social.				
--	---	--	--	--	--

c) Membandingkan realisasi kinerja s/d akhir tahun renstra

**Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode
RPJMD/RENSTRA**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan	Nilai IKM	83	89,02	6,02
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang : Pemerintahan, Pembangunan perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan social.	80 %	100 %	20 %

d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi Nasional

**Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan	Nilai IKM	111%	-	-
	Persentase rekomendasi ,fasilitasi serta hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang : Pemerintahan,Pembangunan perekonomian,ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan social.	100%	-	-

e) Analisis atas keberhasilan dan kegagalan serta peningkatan dan penurunan kinerja

**Tabel 3.5
COST PER OUTCOME
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan	Nilai IKM	3.826.516.922	93
		Persentase rekomendasi	275.247.500	7

		,fasilitasi serta hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang : Pemerintahan, Pembangunan perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan social.		
--	--	---	--	--

Tabel 3.6
COST PER OUTCOME
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
Sasaran 1 Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai IKM	82	89,02	111			
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten					3.826.516.922	2.961.203.249	77,39
Sasaran 2 Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang :	80	100	125			
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					44.240.000	43.340.000	97,97
2. Program Pemberdayaan Masyarakat					93.720.000	92.942.368	99,17

Desa dan Kelurahan	Pemerintahan, Pembangunan perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan social.				82.167.500	79.813.565	95,92
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum							
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					55.120.000	54.558.400	98,98

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai IKM	100%	77,39	22,61
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Persentase rekomendasi , fasilitasi serta hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang : Pemerintahan, Pembangunan perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan social.	100 %	90,60 %	9,40

PENYAJIAN DATA KINERJA

Tabel 3.8

PEHITUNGAN TARGET DAN REALISASI CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) TAHUN 2021

NO.	URAIAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	%
1	2	3	4	5
	PELAYANAN BIDANG PERIJINAN	17	17	100
	1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) paling besar 200 m2, tidak bertingkat, dan kecuali pengembang perumahan, serta tidak untuk tempat usaha	17	17	100
B.	PELAYANAN BIDANG NON PERIZINAN	100	100	100
	1. Penetapan gaji berkala staf Kecamatan	100	100	100
	2. Pemberian izin cuti Pegawai staf Kecamatan	100	100	100
	3. Pelantikan Pejabat Kepala Desa	100	100	100
	4. Pelantikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Penggantian Antar Waktu	100	100	100
	5. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDES	100	100	100
	6. Pemberian Rekomendasi atas permohonan izin keramaian	100	100	100
	7. Menerbitkan Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan dalam satu Kabupaten	100	100	100
	TARGET	75	75	100

Sumber : data Kec. Puri

g) Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja .

Tabel 3.9
Perbandingan jumlah anggaran dan penyerapan anggaran Tahun 2021

NO	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	331.534.227	319.218.332	96,29
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	57.750.000	57.650.000	99,83
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6.200.000	6.000.000	96,77
4	Program peningkatan kualitas pelayanan kinerja kecamatan	268.045.000	242.859.000	90,60

C. Realisasi Anggaran

Dari pagu anggaran Belanja Langsung Kecamatan Puri Tahun 2021 sebesar Rp.4.101.764.422,00 penyerapan/realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.3.230.857.582,00 atau 79 % dengan rincian per program / kegiatan / sub kegiatan sebagai berikut :

RINGKASAN ANGGARAN DAN REALISASI APBD KECAMATAN PURI TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021		Selisih (Rp)	% capaian
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,000,000.00	6,599,000.00	401,000.00	94
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,000,000.00	4,992,900.00	7,100.00	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,246,466,922.00	2,420,403,705.00	826,063,217.00	75
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11,000,000.00	10,280,000.00	720,000.00	93
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	17,500,000.00	15,600,000.00	1,900,000.00	89
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000.00	4,996,500.00	3,500.00	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	240,000,000.00	231,419,335.00	8,580,665.00	96
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	100

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,000,000.00	4,999,000.00	1,000.00	100
	Penyediaan Bahan/Material	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16,050,000.00	15,353,000.00	697,000.00	96
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60,000,000.00	40,347,257.00	19,652,743.00	67
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28,000,000.00	26,987,152.00	1,012,848.00	96
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	75,000,000.00	73,300,500.00	1,699,500.00	98
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30,000,000.00	29,990,000.00	10,000.00	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2,500,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	60
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21,000,000.00	20,790,000.00	210,000.00	99
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,000,000.00	6,644,900.00	3,355,100.00	66
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	29,240,000.00	28,340,000.00	900,000.00	97
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	100
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN				

	KELURAHAN				
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	33,720,000.00	33,437,848.00	282,152.00	99
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60,000,000.00	59,504,520.00	495,480.00	99
IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8,200,000.00	6,250,000.00	1,950,000.00	76
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	73,967,500.00	72,563,565.00	1,403,935.00	98
V.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8,080,000.00	8,010,000.00	70,000.00	99
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12,000,000.00	11,998,000.00	2,000.00	100
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10,000,000.00	9,901,200.00	98,800.00	99
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	11,000,000.00	10,973,200.00	26,800.00	100
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	14,040,000.00	13,676,000.00	364,000.00	97
	Jumlah	4,101,764,422.00	3,230,857,582.00	870,906,840.00	79

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran strategik, dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja kegiatan yang secara nyata menunjukkan bahwa dari 2 indikator kinerja kegiatan Tahun 2021, 1 indikator kinerja yang mencapai 111 % capaian kinerja yaitu Cakupan nilai IKM dan 1 indikator mencapai 125% yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan..

Langkah-langkah yang dilaksanakan untuk memenuhi target :

- Melakukan perencanaan yang seksama merupakan salah satu langkah guna menekan jarak antara target dan realisasi.
- Pada tahun-tahun mendatang efisiensi anggaran adalah hal yang harus dilakukan sebagai langkah untuk memenuhi target dengan dana yang tersedia.

Dari total belanja langsung OPD Kecamatan Puri Tahun 2021 sebesar Rp.4.101.764.422,00 penyerapan/realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.3.230.857.582,00 atau 79 %



NALURITA P., SSTP. M.Med.Kom.

Pembina

NIP. 19810402 199912 2 001